

**KONTRIBUSI LEMBAGA HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA ADAT DALAM
PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Panyabungan)**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Hukum Islam

OLEH
MUHAMAD HASAN SEBYAR
NIM. 4001203028

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**KONTRIBUSI LEMBAGA HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA ADAT DALAM
PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Panyabungan)**

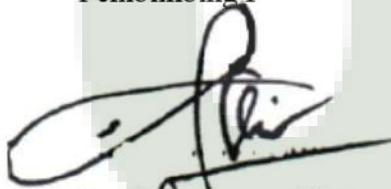
Oleh:

**Muhamad Hasan Sebyar
NIM 4001203028**

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan untuk Ujian Terbuka
Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Maret 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125801

Pembimbing II



Dr. Sukiati, MA
NIP. 197011201996032002
NIDN. 2020117002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul: **“Kontribusi Lembaga Hukum Islam dan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan (Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Panyabungan)”** atas Nama **Muhamad Hasan Sebyar** NIM. **4001203028**, Program Studi Hukum

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang terbuka (Promosi Doktor) pada Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, Maret 2023

Panitia Ujian Tertutup Disertasi
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201

Sekretaris

Dr. Phil. Zainul Fajid, M.A
NIP. 19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703

Anggota

Penguji I

Prof. Dr. Pagar, M.A
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810

Penguji II

Dr. Sukriati, MA
NIP. 19701120 199603 2 002
NIDN. 2020117002

Penguji III

Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810

Penguji IV

Dr. Dhiyauddin Tanjung, S.H.I., M.A
NIP. 19791010 200901 1 010
NIDN. 2020107903

Penguji V

Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003
NIDN. 2004076801

Mengetahui
Direktur PPS UIN SU

Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP 19620814 1992203 1 003
NIDN 201486201

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
... يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
... وُ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةَ *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh نَزَّالَ (*Nazzala*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh : الشمس (Asy-Syamsu).

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-). Contoh القمر (Al-Qamaru)

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif. Contoh تأخذ (Ta' khudzu).

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

Bismillahirrahmānirrahīm: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

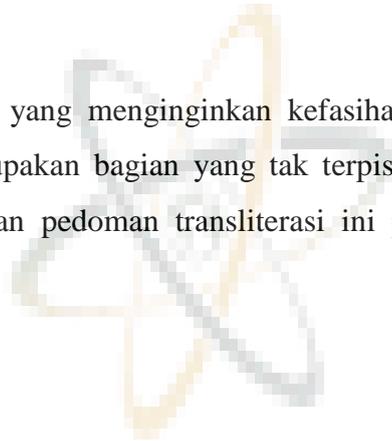
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

10. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'ālamīn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan disertasi yang berjudul: “Harmonisasi Lembaga Hukum Islam dan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. *ṣalawat* dan salam kita haturkan kepada baginda *Rasulullah Muhammad SAW* yang telah memberikan *uswatun ḥasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'ī. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A selaku Ketua Program Studi S3-Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag, dan Dr. Sukiati, MA sebagai promotor dan co-promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan disertasi ini.
5. Para Dosen dan Staf Administrasi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan terutama di Pascasarjana yang telah banyak memberikan ilmu dan kemudahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
6. Teman sejawat mahasiswa program pascasarjana S3-Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan yang telah memberikan dukungan agar penulis segera menyelesaikan studi doctoral.

Dengan terselesaikannya laporan disertasi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Medan, Januari 2023

Penulis



Muhamad Hasan Sebyar, MH
NIM. 4001203028

ABSTRAK



Judul : Kontribusi Lembaga Hukum Islam Dan Lembaga Adat
Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan (Analisis
Putusan-Putusan Pengadilan Agama Panyabungan)
Nama : Muhamad Hasan Sebyar
Pembimbing : 1. Prof. Pagar Hasibuan, M.Ag
2. Dr. Sukiati Sugiono, MA

Upaya penyelarasan (harmonisasi) antara hukum adat dan hukum Islam (*fiqih*) telah lama terjadi di Indonesia. Hubungan keduanya sangat akrab di dalam masyarakat terutama bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Saat kedua hukum ini telah akur dan berharmonisasi, dewasa ini kita melihat hukum Islam (*fiqih*) dalam masyarakat kembali dibenturkan dengan hukum Islam yang tertulis (*qanun* dan *qada*). Sehingga muncul dualisme pemahaman yaitu hukum Islam dan hukum Negara. Padahal ketiga hukum ini yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional telah saling berharmonisasi dan saling mengakui untuk menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan lembaga adat terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan. Pengadilan Agama Panyabungan sebagai lembaga hukum Islam dan pelaksana kekuasaan kehakiman menggunakan surat keterangan *Hatobangon* (tokoh adat) yang mewakili masyarakat setempat dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*: mengetahui dan menganalisis kontribusi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. *Kedua*; mengetahui dan menganalisis pola harmonisasi Lembaga Hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. *Ketiga*; menemukan metode harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*Socio legal Approach*).

Hasil penelitian ini terdiri dari tiga kesimpulan, yaitu 1) Kontribusi lembaga hukum Islam dan lembaga adat adalah sebagai mediator dalam memecahkan masalah antara hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat dengan hukum yang dituntut oleh negara. 2) Pola harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga Adat dalam perkara dispensasi kawin terdiri dari lima pola yaitu pola normatif, pola fungsional, pola superior, pola parsial, dan pola dinamis. 3) Metode harmonisasi antara lembaga Hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan dengan tiga cara yaitu Harmonisasi Pemahaman, Harmonisasi Aktif dan Harmonisasi Pasif.

Kata Kunci : *Kontribusi, Lembaga Hukum Islam, Lembaga Adat, Dispensasi Kawin*

SUMATERA UTARA MEDAN

ABSTRACT



Name : Muhamad Hasan Sebyar
Dissertation Title : Contribution of Islamic Legal Institutions and Customary Institutions in the Implementation of Marriage Dispensation (Analysis of Decisions of the Panyabungan Religious Court)
Supervisor I : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
Supervisor II : Dr. Sukiati, MA.

Efforts to promote alignment (harmonization) between customasssry law and Islamic law (fiqh) have long been running nationally. The two laws have a close relationship in society, especially among those who embrace Islam. When these two laws are starting to conform to each other and harmonize, today has seen the clash between Islamic law (fiqh) and its written versions (*qanun* and *qadla*) in society again. This clash has led to a dualism of understanding between Islamic law and state law, even though the three legals – the Islamic legal, the customary law, and the national legal – have harmonized and mutually recognized each other as an inseparable unit. A harmonization between Islamic Legal Institutions and customary institutions is well-represented by the collaboration between Panyabungan Religious Court as the executor of judicial power and *Hatobangon* (traditional leaders) who represents the local community in resolving cases of marriage dispensation.

This study aims to, *firstly*, identify and analyze the harmonization of Islamic legal Institutions and customary institutions in implementation of marriage dispensation at Panyabungan Religious Court; *second*, find out and analyze the pattern of harmonization between the Islamic legal institutions and the customary institutions in implementation of marriage dispensation at Panyabungan Religious Court; and *third*, find out a method of harmonization between Islamic legal institutions and Customary Institutions in implementation of marriage dispensation at Panyabungan Religious Court.

This research is normative-empirical legal research. The approaches employed in this research are conceptual approach, statute approach, and socio-legal approach.

The results of this study consist of three conclusions. First, The contribution of Islamic legal institutions and customary institutions as mediators in solving problems between Islamic law that applies in society and the law demanded by the state. Second, six patterns of harmonization were identified between Islamic legal institutions and customary institutions in marriage dispensation cases, i.e. normative pattern, functional pattern, superior pattern, partial pattern, random pattern, and dynamic pattern. Third, the harmonization method between Islamic Legal Institutions and Customary Institutions in implementation of marriage dispensation was carried out by means of Understanding Harmonization, Active Harmonization and Passive Harmonization.

Keywords: *Contribution, Islamic Legal Institutions, Customary Institutions, Marriage Dispensation*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

مستخلص البحث



الاسم : محمد حسن سيار

عنوان الأطروحة: مساهمة مؤسسات الشريعة الإسلامية والمؤسسات العرفية في قضايا إعفاء الزواج (تحليل قرارات محكمة الدينية بانيابونجان)

المشرف الأول : أ. دكتور. بغار ، الماجستير.

المشرف الثاني : د. سوكياتي ، الماجستير

تتواصل جهود الموازنة بين القانون العرفي والقانون الإسلامي (الفقه) منذ فترة طويلة في إندونيسيا. العلاقة بين الاثنين مألوفة جدا في المجتمع، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام. عندما يتوافق هذان القانونان ويؤامنان، نرى اليوم القانون الإسلامي في المجتمع يتعارض مرة أخرى مع القانون الإسلامي المكتوب (القانون والقضاء). وهكذا تظهر ازدواجية الفهم، أي القانون الإسلامي وقانون الدولة. على الرغم من أن هذه الأنظمة القانونية الثلاثة، وهي النظام القانوني الإسلامي، والنظام القانون العرفي، والنظام القانوني الوطني، قد واءمت واعترفت ببعضها البعض لتصبح وحدة لا تنفصل. يمكننا أن نرى الموازنة بين القانون الإسلامي والقانون الوطني الذي تمثله المحكمة الدينية بانيابونجان كمنفذ للسلطة القضائية مع هاتوبانغون (الزعماء التقليديون) الذين يمثلون المجتمع المحلي في حل مسألة الإعفاء من الزواج.

تهدف هذه الدراسة أولاً إلى: معرفة وتحليل موازنة النظام القانون الإسلامي والنظام القانون العرفي في إعفاء الزواج في المحكمة الدينية بانيابونجان. ثانياً؛ معرفة وتحليل نمط الموازنة بين مؤسسات الشريعة الإسلامية والمؤسسات العرفية في إعفاء الزواج في المحكمة الدينية بانيابونجان. ثالثاً؛ حصول طريقة الموازنة بين مؤسسات الشريعة الإسلامية والمؤسسات العرفية في إعفاء الزواج في المحكمة الدينية بانيابونجان.

نوع هذا البحث هو بحث قانوني معياري-تجريبي. المنهج المستخدم في هذه الدراسة هي المنهج مفاهيمي (*conceptual approach*)، المنهج القانون (*statuta approach*)، و المنهج القانوني الاجتماعي (*sosio legal approach*).

تتكون نتائج هذه الدراسة من ثلاث استنتاجات، وهي (1) مساهمة المؤسسات الشرعية الإسلامية والمؤسسات العرفية كوسيط في حل المشكلات بين الشريعة الإسلامية المطبقة في المجتمع والقانون الذي تطالب به الدولة. (2) يتكون نمط الموازنة بين المؤسسات الشرعية الإسلامية والمؤسسات العرفية في إعفاء الزواج في المحكمة الدينية بانيابونجان من ستة أنماط، وهي النمط المعياري، والنمط الوظيفي، والنمط العلي، والنمط الجزئي، والنمط العشوائي، والنمط الديناميكي. (3) يتم تنفيذ طريقة الموازنة بين

المؤسسات الشرعية الإسلامية والمؤسسات العرفية في إعفاء الزواج في المحكمة الدينية بانجابونجان من خلال ثلاث طرق ، وهي المواءمة الفهمية والمواءمة الفعلية والمواءمة السلبية.
الكلمات المفتاحية: مساهمة المؤسسات الشرعية الإسلامية ، والمؤسسات العرفية ، إعفاء الزواج



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAKSI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	: PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Identifikasi Masalah..... 12
	C. Batasan Masalah..... 13
	D. Rumusan Masalah..... 13
	E. Tujuan Penelitian..... 14
	F. Penjelasan Istilah..... 14
	G. Kegunaan Penelitian..... 16
	H. Kerangka Teoritis..... 16
	I. Kajian Terdahulu..... 31
	J. Metode Penelitian..... 36
BAB II	: KAJIAN PUSTAKA
	A. Sistem Hukum di Indonesia..... 46
	1. Hukum adat..... 46
	2. Sistem Hukum Islam..... 59
	3. Sistem Hukum Barat..... 69
	B. Harmonisasi Hukum..... 70
	C. Konsep-Konsep Harmonisasi Hukum..... 87
	D. Hambatan-Hambatan Harmonisasi hukum..... 94
	E. Metode Harmonisasi hukum..... 95
BAB III	: DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
	A. Proses Perkara Dispensasi Kawin..... 100
	1. Proses Pra persidangan..... 101
	2. Proses Persidangan..... 109
	B. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021..... 129
	1. Adat Istiadat atau Budaya <i>Marlojong</i> 155
	2. Takut Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Hukum Islam..... 162

	3. Hamil dan Pecah Perawan.....	163
BAB IV	: KONTRIBUSI LEMBAGA HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN	
	A. Kontribusi Lembaga Hukum Islam dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	166
	B. Kontribusi Lembaga Adat dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	191
BAB V	: HARMONISASI LEMBAGA HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA ADAT	
	A. Pola Harmonisasi dalam Pelaksanaan Dispensasi Kawin....	206
	1. Pola Harmonisasi Normatif.....	211
	2. Pola Harmonisasi Fungsional.....	214
	3. Pola Harmonisasi Superior.....	216
	4. Pola Harmonisasi Parsial.....	222
	5. Pola Harmonisasi Dinamis.....	224
	B. Metode Harmonisasi dalam Pelaksanaan Dispensasi Kawin	225
	1. Harmonisasi Pemahaman.....	226
	2. Harmonisasi Aktif.....	229
	3. Harmonisasi Pasif.....	236
BAB VI	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	241
	B. Rekomendasi.....	247
	DAFTAR PUSTAKA.....	249
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021.....	10
Tabel 1.2 Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021.....	11
Tabel 1.3 Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021	39
Tabel 3.1 Komponen-Komponen dan Fungsinya dalam Proses Pra Presidangan	101
Tabel 3.2 Komponen Sistem dan Fungsinya Dalam Proses Persidangan.....	110
Tabel 3.3 Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Yang Diterima, Ditolak, Dicabut, Gugur, dan Batal`.....	111
Tabel 3.4 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021	130
Tabel 3.5 Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021	131
Tabel 3.6 Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan Agama Panyabungan 2019-2021	134
Tabel 3.7 Jumlah Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021.....	154
Tabel 3.8 Lama Berpacaran Sebelum Melakukan <i>Marlojong</i>	159
Tabel 3.9 Permohonan Dispensasi Berdasarkan Usia Pada Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021.....	160
Tabel 3.10 Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Usia 14, 15, Dan 16 Tahun Pada Perempuan Tahun 2019-2021.....	160
Tabel 3.11 Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Usia 14, 15, Dan 16 Tahun Pada Laki-Laki Tahun 2019-2021	163
Tabel 3.12 Lama Berpacaran Sebelum Hamil di Luar Nikah	163